



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BPS PROVINSI MALUKU UTARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DEDI KINTORO
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BPS PROVINSI MALUKU UTARA
3. NHK : 458336

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.755.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 190 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/83 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.255.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	104.500.000
1. MOTOR, YAMAHA JUPITER-Z Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000		
2. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA 1.5 SV 4X2 MT / MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 101.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	60.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	64.286.190
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.983.786.190
III. HUTANG	Rp.	194.500.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.789.286.190

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.